

ABSTRACT

This study aims to describe the transparency, participation, and accountability of village government in managing village finances. The background of this research is how a village with qualified human resources, but still not able to manage village finance for people's welfare.

This research is expected to be useful for Muara Enim Regency, especially villages for improving good governance in managing village finances so that they are in accordance with applicable regulations. The research was carried out in the Air Enau Village. Data collection is done by interviews and documentation. The research method used was descriptive qualitative with a case study approach.

This study found that in its financial management, Air Enau Village still lacked consultation between village governments and village communities to review the use of village funds. This results in a budget that is still not well targeted, lack of supervision from the local government and the community, and a lack of awareness from the community to be involved in all village activities.

Keyword: Financial management of village, transparency, participation, accountability.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini karena bagaimana sebuah desa dengan sumber daya manusianya masih belum mampu mengelola keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kabupaten Muara Enim, khususnya desa-desa dalam meningkatkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian dilakukan pada desa Air Enau. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Kajian ini menemukan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa Air Enau masih kurangnya musyawarah antar pemerintah desa dan masyarakat untuk meninjau penggunaan dana desa sehingga masih ada anggaran yang belum tepat sasaran, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan masyarakat, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk terlibat dalam segala kegiatan desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas.